

DAFTAR PUSTAKA

- A Hamid S Attamimi. *Ilmu Perundang - Undangan Dasar - Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Adrian Sutedi. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Alfin Sulaiman. *Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Alumni, 2011.
- Frida Maria. *Ilmu Perundang - Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Gunawan Widjaja. *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- H. Imam Soebechi. *Hak Uji Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Hotman P Sibuea, *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan & Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Ibnu Syamsi. *Dasar – Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Ikhwan Fahrojih dan Mokh. Najih. *Menggugat Peran DPR dan BPK Dalam Reformasi Keuangan Negara*. Malang: Trans Publishing, 2008.
- Jimly Asshiddiqie, M Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Johnny Ibrahim. *Teori & Metodologi Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- M. Yahya Harahap. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Muhammad Djafar Saidi. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Setio Sapto Nugroho. *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan*. Jakarta: Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bagian Hukum,

Biro Hukum dan Humas, 2009.

Sudikno Mertokusumo dan A Pilito. ***Bab – Bab Tentang Penemuan Hukum.*** Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

Victor Iamnuel W. Nalle. ***Konsep Uji Materiil Kajian Pembentukan dan Uji Materiil Peraturan Kebijakan di Indonesia.*** Malang: Setara Press, 2013.

W. Riawan Tjandra. ***Hukum Keuangan Negara.*** Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958).

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan

Perseroan Terbatas. (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6006).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4555).

DOKUMEN RESMI

Risalah Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

JURNAL

Maria Farida Indrati. *Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jakarta: Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 4. No. 2, Juni, 2007.

Wicipto Setiadi. *Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 4. No. 2, Juni, 2007.

INTERNET

<http://news.detik.com/kolom/d-3398217/apakah-pp-no-722016-diterbitkan-untuk-legalisasi-penghancuran-bumn>

<http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/01/19/ok0nha327-holding-bumn-peraturan-pemerintah-dan-pelemahan-undangundang>